EVALUASI KEBIJAKAN SUBSIDI PUPUK TERHADAP STIMULAN KEMANDIRIAN EKONOMI PETANI KECIL DI KABUPATENMALANG STUDI KASUS DI 16 KECAMATAN

Shiva Nailul Muna[1], Slamet Muchsin[2], Retno Wulan Sekarsari[3]

[1,2,3]*Universitas Islam Malang*
E-mail : shivanailulmuna2@gmail.com

ABSTRAK

Tantangan serius seperti penyusutan lahan, perubahan iklim, serta serangan hama yang mengancam kesejahteraan petani kecil menjadi masalah utama di sektor pertanian Malang. Pun pemerintah telah menerapkan kebijakan seperti subsidi pupuk, benih, alat pertanian, dan asuransi (AUTP), namun dampak padakemandirianekonomi petanui masihjadi bahanpertanyaan. Penelitianini mengevaluasipelaksanaan kebijakan tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan kerangka teori Anderson dan Edwards III, yang menyoroti aspek komunikasi, sumber daya, birokrasi, dan disposisi pelaksana. Di tahun 2025 data produksi padi mengalami penurunan luas panen yang cukup signifikan, hal ini berdampak pada PDRB daerah. Kendala administratif pemanfaatan e-RDKK serta lemahnya kapasitas kelompok tani menjadi faktor utama dalam lambatnya distribusi bantuan. Penelitian dilakukan untuk mencari solusi strategi perbaikan kebijakan agar subsidi tidak hanya menjadi penopang jangka pendek, tetapi dapat memperkuat finansial serta kemandirian ekonomi petani kecil yang berkelanjutan di Kabupaten Malang. Melalui evaluasi yang berkala, diharapkan tercipta tata kelola subsidi yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis pada hal nyata di lapangan.

Kata Kunci : *Subsidi Pertanian, Petani Kecil, Kemandirian Ekonomi, Evaluasi Kebijakan, Kabupaten Malang, Ketahanan Finansial.*

ABSTRACT

The agricultural sector in Malang Regency is facing serious structural challenges due to land shrinkage, climate change, and pest attacks that threaten the welfare of smallholder farmers. Although the government has implemented subsidy and incentive policies such as fertilizers, seeds, agricultural machinery, and crop insurance (AUTP), their effectiveness in promoting farmers' economicindependence remains questionable. This study evaluates the implementation of these policies using a qualitative approach with the theoretical framework of Anderson and Edwards III, which emphasizes communication, resources, bureaucracy, and implementers' disposition. Field data indicate a significant decline in harvested area and rice production up to 2025, which also affects the contribution of the agricultural sector to the regional Gross Domestic Product (GDP). Administrative constraints in the use of digital systems such as e-RDKK, as well as weak institutional capacity of farmer groups, are the main obstacles to the effective and targeted distribution of assistance. Thisresearchaimstoprovidepolicyimprovement recommendationssothat subsidiesdonot merely serve as short-term support, but become instruments for transforming smallholder farmers toward financial resilience and sustainable economic independence in Malang Regency. Through a comprehensive evaluation, it is expected that a more transparent, accountable, and field-based subsidy governance system can be established, grounded in strengthening real capacities at the grassroots level.

Keywords : *Agricultural Subsidies, Smallholder Farmers, Economic Independence, Policy Evaluation, Malang Regency, Financial Resilience.*

PENDAHULUAN

Sektor pertanian adalah sektor utama dalampembangunan negara karena berperanpentinguntuk menjaga ketahanan pangan, menyediakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,khususnya di wilayah pedesaan. Hampir seluruh pelaku usaha tani Indonesia masih didominasi olehperani kecil dengan berbagai kendalanya, seperti keterbatasan modal, biaya sarana produksi yang tinggi, keterbatasan teknologi, stabilitas harga hasil panen, serta tingginya risiko gagal panen. Pemamfaatan pendapatan belum terpenuhi sehingga pemerintah terus mengembangkan berbagai kebijakan guna meningkatkan produksi, memperkuat daya saing usaha dan turut serta mendukung ketahanan pangan nasional. Maka dari itu kebijakan subsidi tidak hanya bentuk dukugan dari pemerintah, akan tetapi merupakan instrument pemberdayaan yang diharapkan mampu meningkatkan kemandirian ekonomi petani secara berkelanjutan.

Malang merupakan daerah dengan potensi terbesar di di Provinsi Jawa Timur, oleh karena itu berbagai program subsidi pertanian,pupuk, bantuan benih, alat dan mesin, serta program pendampingan petani, rutin di laksanakan untuk meningkatkan produktifitas dan kesejahteraan petani. Namun pada kenyataannya, implementasi kebijakan masih menghadapi berbagai macam tantangan, di antaranya tidak tepatnya pemanfaatan subsidi, keterlambatan distribusi bantuan, lemahnya sistem pengawasan dan pemanfaatkan teknologi digital yang masih kurang maksimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan subsidi tidak hanya ditentukan oleh tersalurkannya bantuan kepada petani, tetapi juga oleh kemampuan kebijakan tersebut dalam mendorong kemandirian ekonomi petani kecil sebagai tujuan jangka panjang pembangunan pertanian. Oleh karena itu di pilihlah sample sebagai berikut:

Tabel 1. Karakteristik Responden Kuantitaif berdasarkan Lama Bertani

No	Lama Bertani	JumlahResponden	Persentase
1.	<5 tahun	13	13,54%
2.	5– 10 tahun	32	32,29%
3.	>10tahun	52	54,17%
	Total	97	100%

Sumber:DatadiolahPenulis

Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 97 orang petani kecil penerima subsidi pupuk yang tersebar di enam belas kecamatan di Kabupaten Malang. Penentuan responden dilakukan dengan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria petani penerima subsidi pupuk yang aktif dalam kegiatan pertanian. Pada awalnya, penelitian menetapkan minimal lima responden pada setiap kecamatan sebagai sampel penelitian. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kecamatan yang memiliki tambahan responden menyesuaikan kondisi lapangan dan ketersediaan petani penerima subsidi pupuk yang memenuhi kriteria penelitian. Berikut merupakan jumlah lahan kelola masing-masing tani yang mengjadi sample:

Tabel 2. Karakteristik Responden Kuantitatif berdasarkan Luas Lahan

No	Luas Lahan	JumlahResponden	Persentase
1.	<0,5 ha	26	26,80%

2.	0,5 – 1 ha	37	38,14%
3.	> 1ha	34	35,05%
	Total	97	100%

Sumber:DatadiolahPenulis

Data dari tabel di atas digunakan untuk mengukur sejauh mana kematangan serta durasi pengisian angket dalam mengoperasikan bisnis pertanian mereka. Tingkat kemahiran bercocok tanam yang dikuasai oleh subjek penelitian mampu menggambarkan kemahiran mereka terhadap ladang yang di tekuni.

Dalam penelitian sebelumnya, telah membahas kebijakan subsidi pertanian dari berbagai sudut pandang. Misalnya pada penelitian Titin Kurniatin, Suyeno, dan Retno Wulan Sekarsari (2023) yang menunjukkan bahwa pupuk bersubsidi yang di distribusikan berjalan sesuai dengan ketentuan, namun pada masanya masih ditemukan permasalahan berupa harga yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET), hal ini mengindikasikan lemahnya pengawasan, serta ketidaktepatan sasaran penerima. Ada pula penelitian yang dilakukan oleh Endi, Asnah, dan Farah Mutiara (2024) telah menjelaskan jika kelompok tani memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi melalui penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), kerjasama antarpemangku kepentingan, dan pendampingan penyuluh pertanian.

Lain hal pada penelitian Puspa Sari, Khoiron, dan Agus Zainal Abidin (2025) yang dimana dikatakan bahwa pemberdayaan kebijakan Sistem Inovasi Daerah (SIDA) di Kabupaten Malang belum berjalan maksimal akibat rendahnya penggunaan teknologi, terbatasnya akses pengelolaan pertanian, juga lemahnya sistem pengawasan. Dan Muhammad Fajar Maulana dan Yohanes Wilfrid Leki (2023) berpendapat jika prioritas kebijakan subsektor pertanian di Kabupaten Malang lebih berfokus pada peningkatan ketersediaan dan akses pangan, dan untuk pengawasan implementasi kebijakan masih harus di lakukan penguatan.

Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian tentang kebijakan subsidi pertanian masih didominasi oleh pembahasan mengenai efektiv atau tidaknya distribusi pupuk, tugas utama kelompoktani, digitalisasi serta produktivitas komoditas. Sebagian besar penelitian menyoroti keberhasilan kebijakan berdasarkan output, seperti tepatnya sasaran penyaluran bantuan, kepuasan penerima, atau peningkatan produksi tani. Sementara penelitian yang menghubungkan pengaruh kebijakan subsididengan pencapaian berupa kemandirian ekonomi petani kecil masih relatif terbatas.

METODE

Penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn sebagai landasan untuk menganalisis implementasi kebijakan melalui enam kriteria evaluasi,yaitu (1) efektivitas, (2) efisiensi, (3) kecukupan, (4) pemerataan, (5) responsivitas, dan (6) ketepatan. Keenam kriteria tersebut memungkinkan evaluasi dilakukan secara komprehensif, tidak hanya terhadap hasil akhir kebijakan, tetapi juga terhadap proses implementasi, penggunaan sumber daya, distribusi manfaat, serta kemampuan kebijakan dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Alexander Chayanov pada teori ekonomi petani digunakan untuk menjelaskan bahwa rumah tangga petani merupakan unit ekonomi yang berorientasipada pemenuhan kebutuhan keluarga melaluikeseimbangan antara tenaga kerja dan konsumsi atau *labor-consumer balance*. Untuk itu keberhasilan kebijakan subsidi

bukan di ukur dari seberapa banyak produktivitas, tetapi juga dari kemampuan petani membangun kemandirian ekonomi, memperkuat kapasitas usaha tani, dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan.

Hasil uraian di atas menjelaskan bahwa, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan subsidi bagi petani kecil di Kabupaten Malang dengan enam kriteria evaluasi WilliamN. Dunn juga peranan serta kontribusinya untuk memperkuat ekonomi petani kecil berdasarkan perspektif teori Alexander Chayanov. Dan di hadapkan mampu memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan teori kebijakan publik di sektor pertanian.

Adanya data empat empris yang diperoleh dari lapangan serta dokumen yang mendukung kebijakan subsidi pupuk bagi petani kecil di tempat penelitian. Maka data yang akan di pergunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer di dapat langsung mealui responden lewat observasi, wawancara mendalam, serta penyebaran kuesioner kepada petani kecil penerima manfaat. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi pemerintah daerah, laporan instansi terkait, arsip kebijakan, literatur ilmiah, serta publikasi statistik yang relevan dengan fokus penelitian.

Petani kecil penerima pupuk bersubsidi akan menjadi responden utama, pemilihan tersebut telah di dasarkan pada keterlibatan langsung dan tingkat pemahaman terhadap pelaksanaan program di lapangan. Penelitian ini akan digambarkan secara deskriptid dan objektif karena pendekatan kuantitatif akan di gunakan untuk mengukur pendapat responden pada pelaksanaan kebijakan melalui kuesioner berbasis skala Likert. Sementara itu pendekatan kualitatif digunakan untuk mengetahui lebih dalam proses penerapan kebijakan, faktor pendukung serta penghambat, dan dampak apa yang kemudian timbul untuk kemandirian ekonomi petani kecil.

Analisis Data

Metode interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data akan menjadi dasar data kualitatif yang di suguhkan untuk menarik sebuah kesimpulan. Analisis ini dipilih untuk memahami proses penerapan kebijakan dan isu sosial di lapangan. Dilakukan dengan menggunakan skala Likert pada perhitungan persentase dan nilai rata-rata untuk mengetahui kecenderungan persepsi responden terhadap pelaksanaan kebijakan subsidi pupuk. Keabsahan data kualitatif diuji melalui teknik triangulasi sumber, teknik, dan waktu, serta melalui member check kepada informan untuk memastikan kesamaan data dengan kondisi nyata di lapangan.

Tabel 3. Data Kuisioner yang Sudah Diolah Penulis

No.	Pernyataan	SS	S	TS	Skor Total	Rata-rata	Persentase (%)	Kategori
1	Apakah subsidi pupuk membantu meningkatkan hasil pertanian Anda?	70	26	1	263	2,71	90,38	Sangat Baik
2	Apakah subsidi pupuk meningkatkan pendapatan Anda?	63	31	3	254	2,62	87,29	Sangat Baik

3	Apakah Anda menjadi lebih mandiri dalam bertani sejak adanya subsidi?	34	57	6	222	2,29	76,29	Baik
4	Apakah pupuk subsidi mudah diperoleh?	52	43	2	244	2,52	83,85	Sangat Baik
5	Apakah pupuk subsidi tersedia tepat waktu?	52	43	2	244	2,52	83,85	Sangat Baik
6	Apakah jumlah pupuk subsidi yang Anda terima mencukupi kebutuhan?	59	37	1	252	2,6	86,6	Sangat Baik
7	Apakah Anda masih membeli pupuk non-subsidi?	18	62	17	195	2,01	67,01	Baik
8	Apakah pembagian pupuk di kelompok tani Anda sudah adil?	54	43	0	248	2,56	85,22	Sangat Baik
9	Apakah semua anggota kelompok tani Anda mendapatkan pupuk subsidi?	70	21	6	258	2,66	88,66	Sangat Baik
10	Apakah jenis pupuk subsidi sesuai dengan kebutuhan tanaman Anda?	31	64	2	223	2,3	76,63	Baik
11	Apakah keluhan petani pernah ditanggapi oleh pihak terkait?	71	24	2	263	2,71	90,38	Sangat Baik
12	Apakah subsidi pupuk tepat sasaran kepada	19	77	1	212	2,19	72,85	Baik

	petani yang seharusnya?							
13	Apakah waktu pembagian pupuk sesuai dengan musim tanam?	70	24	3	261	2,69	89,69	Sangat Baik
14	Apakah Anda memahami mekanisme/cara mendapatkan pupuk subsidi?	58	38	1	251	2,59	86,25	Sangat Baik
15	Apakah informasi subsidi pupuk mudah diperoleh?	55	40	2	247	2,55	84,88	Sangat Baik
16	Apakah akses ke pupuk subsidi mudah dijangkau?	59	35	3	250	2,58	85,91	Sangat Baik
17	Apakah fasilitas pendukung (transportasi, distribusi) memadai?	48	47	2	240	2,47	82,47	Sangat Baik
18	Bagaimana sikap petugas/penyalur pupuk terhadap petani?	59	37	1	252	2,6	86,6	Sangat Baik
19	Apakah pernah terjadi perlakuan tidak adil dalam distribusi pupuk?	71	24	2	263	2,71	90,38	Sangat Baik
20	Apakah proses mendapatkan pupuk subsidi mudah?	49	45	3	240	2,47	82,47	Sangat Baik
21	Apakah prosedur administrasinya jelas?	62	35	0	256	2,64	87,97	Sangat Baik
22	Apakah petani dilibatkan dalam perencanaan	82	14	1	275	2,84	94,5	Sangat Baik

	program subsidi pupuk?							
23	Apakah petani pernah diminta memberikan masukan/evaluasi terkait pupuk subsidi?	66	26	5	255	2,63	87,63	Sangat Baik
24	Bagaimana perubahan hasil panen Anda dengan adanya pupuk subsidi?	70	27	0	264	2,72	90,72	Sangat Baik
25	Apakah Anda bisa bertani tanpa subsidi pupuk?	35	49	13	216	2,23	74,23	Baik
26	Apakah Anda memiliki modal sendiri untuk bertani?	37	60	0	231	2,38	79,38	Baik
27	Apakah Anda akan tetap bertani ke depan?	89	7	1	282	2,91	96,91	Sangat Baik
28	Bagaimana kondisi ekonomi keluarga Anda saat ini?	52	34	11	235	2,42	80,76	Baik
29	Apakah kelompok tani Anda membantu dalam distribusi pupuk?	67	29	1	260	2,68	89,35	Sangat Baik
30	Menurut Anda, subsidi pupuk perlu diperbaiki?	56	32	9	241	2,48	82,82	Sangat Baik
31	Bagaimana transparansi distribusi pupuk saat ini?	65	31	1	258	2,66	88,66	Sangat Baik
32	Apakah subsidi pupuk perlu dilanjutkan ke depan?	94	3	0	288	2,97	98,97	Sangat Baik

Sumber: Data Penelitian diolah Penulis

Hasil analisis data kuesioner menunjukkan bahwa sebagian besar memiliki nilai yang tinggi. Rata-rata persentase jawaban responden berada pada kategori Baik dan Sangat Baik, dalam rentan 80%–98% yang mendominasi. Beberapa temuan penting antara lain: (1) Subsidi pupuk membantu meningkatkan hasil pertanian (90,38%). (2) Subsidi meningkatkan pendapatan petani (87,29%).(3) Akses dan distribusi pupuk dinilai cukup mudah (±83–85%). (4) Transparansi dan keterlibatan petani dalam program cukup tinggi (hingga 94,5%). (5) Keberlanjutan program sangat didukung oleh petani (98,97%).

Hasil ini adalah menunjukan secara umumbahwa programsubsidi pupuk yang memiliki penilaian baik di kalangan petani kecil, meskipun masih terdapat aspek yang perlu diperbaiki terutama pada distribusi dan ketepatan sasaran.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan subsidi pupuk di Kabupaten Malang secara umum telah berjalan cukup baik dan memberikan dampak positif bagi petani kecil. Hal ini terlihat dari meningkatnya akses petani terhadap pupuk bersubsidi, penurunan biaya produksi, serta meningkatnya hasil pertanian. Dalam teori William N. Dunn, kondisi tersebut menunjukkan bahwa aspek efektivitas kebijakan telah tercapai pada tingkat yang cukup, khususnya pada tujuan utama kebijakan yaitumembantu petani kecil melalui penyediaan bahan produksi dengan harga terjangkau.

Penerapan kebijaksanaan subsidi pupuk, menunjukan penggeseran tata kelola menjadi digitalisasi sistem e-RDKK, dan berperan sebagai kerangka utama dalam pendataan dan penentuan penerima subsidi. Hasil penemuan yang menunjukan bahwa digitalisasi sudah meningkatkan efisiensi administrasi, mempercepat proses pendataan, serta memperkuat akurasi data penerima subsidi.

Meski dari penelitian ini juga menunjukan bahwa penerapan kebijakan belum sepenuhnya optimal. Beberapa permasalahan masih sering terjadi seperti keterlambatan distribusi pupuk di wilayah tertentu, keterbatasan kuota pupuk, serta ketidaksesuaian data penerima dalam sistem e-RDKK dengan kondisi riil di lapangan.

Lain hal dari sisi pengawasan, kebijakan subsidi pupuk di Kabupaten Malang melibatkan lembaga KP3, penyuluh pertanian, BPP, dan kelompok tani. Sistem pengawasan dibentuk dengan sebaik-baiknya,namun secara implementatif masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan jangkauan wilayah. Hal ini berdampak pada tidak meratanya intensitas pengawasan serta masih adanya ruang terjadinya penyimpangan.

Dampak kebijakan subsidi pupuk, berorientasi pada hasil yang relatif baik, terutama pada saat menekan biaya produksi dan meningkatkan hasil panen petani kecil. Subsidi pupuk membantu petani menjaga keberlanjutan usaha tani di tengah tingginya harga pupuk nonsubsidi. Meski demikian, penelitian juga menemukan adanya ketergantungan yang cukup tinggi terhadap subsidi pemerintah yang dilakukan oleh petani. Dalam sudut pandang Alexander Chayanov, kondisi ini mencerminkan karakter ekonomi petani kecil yang masih berada dalam zona nyaman, sehingga kebijakan subsidi belum sepenuhnya mendorong kemandirian ekonomi jangka panjang.

Selain itu, pembatasan komoditas subsidi juga menimbulkan dampak negatif bagi petani hortikultura di wilayah dataran tinggi, yang mengalami peningkatan biaya produksi akibat tidak lagi memperoleh pupuk subsidi. Hal ini menunjukkan bahwa aspek pemerataan kebijakan belum sepenuhnya terpenuhi, karena terdapat perbedaan dampak antar subsektor pertanian.

Faktor pendukung pelaksanaan kebijakan meliputi kuatnya dukungan pemerintah daerah seperti (1) peran aktif penyuluh pertanian, (2) keterlibatan kelompok tani, (3) serta implementasi

sistem e-RDKK. Hal-hal tersebut berperan dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta transparansi pelaksanaan kebijakan. Sementara, faktor penghambat utama meliputi (1) keterlambatan distribusi, keterbatasan kuota pupuk, (2) lemahnya pengawasan lapangan, ketidaksesuaian data, (3) serta indikasi penyimpangan distribusi.Kondisi tersebut menjelaskan bahwa implementasi kebijakan masih menghadapi tantangan pada aspek responsivitas, kecukupan, dan pemerataan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan subsidi pupuk di Kabupaten Malang telah berjalan cukup baik dan memberikan dampak positif bagi petani kecil.Kebijakan ini dilaksanakan melalui sistem e-RDKK, kelompok tani, serta distribusi melalui kios resmi dengan pengawasan pemerintah daerah, penyuluh pertanian, dan KP3, yang secara umum mampu meningkatkan ketepatan sasaran dan efisiensi administrasi. Petani merasa terbantu dengan adanya subsidi pupuk yang menekan biaya produksi, dan memberikan efek terhadap stabilitas volume panen dan pendapatan mereka. Di sisi lain tingkat ketergantungan petani terhadap subsidi tersebut masih tinggi, sehingga kemandirian ekonomi petani belumsepenuhnya tercapai. Pun pelaksanaan kebijakan masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterlambatan distribusi, Ketersediaan pupuk, kesalahan data e-RDKK,serta lemahnya pengawasan di tingkat lapangan yang masih membuka peluang terjadinya penyimpangan.

Secara keseluruhan, kebijakan subsidi pupuk di Kabupaten Malang, memberikan manfaat nyata tetapi masih memerlukan penguatan dalam aspek digitalisasi data, kejelasan distribusi, peningkatanpengawasan, optimalisasi penyuluh, serta pemberdayaan petani agar tujuan kemandirian ekonomi petani kecil dapat tercapai secara berkelanjutan.

DAFTARPUSTAKA

Chayanov, A. V. (1925). *The theory of peasant economy*. Moscow: Institute of Agricultural Economics. (Terjemahan Inggris: Thorner, D., Kerblay, B., & Smith, R. E. F. (1966). *The theory of peasant economy*. Homewood, IL: Richard D. Irwin).

Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis* (6th ed.). New York : Routledge. https://reader.ebooks.com/preview?bid=95835620&t=639032374043834716&reqid=162874923&uid=66fc3273666004e1a4dd78098&hash=082919502fc92aaad51efe56246aae8e Diakses pada tanggal 14 Januari pukul 06.09 WIB

Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2024). *Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2024*. Surabaya: BPS Provinsi Jawa Timur.

Dinas Pertanian Kabupaten Malang. (2025). *Data dan laporan kondisi sektor pertanian Kabupaten Malang*. Malang: Dinas Pertanian Kabupaten Malang.

Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2022). *Kebijakan subsidi dan stimulus sektor pertanian*. Jakarta: Kementerian Pertanian RI.

UPLANDProject. (2024). *Laporan pelaksanaan UPLAND Project Kabupaten Malang Tahun 2021-2024*. Jakarta: Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Mahmudan, A. (2025). Distribusi pupuk subsidi di Kabupaten Malang belum optimal. *Radar Malang*. **https://radarmalang.jawapos.com/kabupaten-malang/815758162/110446-petani-di-kabupaten-malang-dijatah-pupuk-subsidi.**Diakses pada tanggal 02 Desember pukul 21.00 WIB

Gemilang, Mustopa. (2025, February 28). Lahan sawah susut 6.977 hektare, DPRD Pemkab Malang jangan seremonial saja! *Ketik.com*. **https://ketik.com/berita/lahan-sawah-susut-6977-hektare-dprd-pemkab-malang-jangan-seremonial-saja.**Diakses pada tanggal 17 Desember pukul 14.00 WIB